

Nilai-Nilai Pendidikan Nasionalisme Di Pondok Pesantren Darussalam Manokwari Papua Barat

^{1*}Dian Indriyani, ²Dwi Noviani, ³Ali Imron

¹STKIP Muhammadiyah Manokwari

²Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Ogan Ilir, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Semarang

Article Info

Article history:

Accepted: 11 Oktober 2022

Publish: 18 October 2022

Keywords:

Pendidika

Nasionalisme

Pondok Pesantren

Article Info

Article history:

Accepted: 11 Oktober 2022

Publish: 18 October 2022

Abstrak

Penelitian ini membantah pendapat Francis Fukuyama, dalam bukunya *The End of History and the Last Man* (2006) yang menyatakan bahwa nasionalisme sudah mati dan tidak perlu diajarkan. Dewey (2010) yang menyebutkan bahwa pendidikan nasionalisme bagi siswa membentuk karakteristik kehidupan yang demokratis yang tidak bisa dilepaskan dalam pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ideologi nasionalisme perlu diajarkan di pendidikan formal karena dianggap sudah mati; (2) Pendidikan nasionalisme merupakan dasar untuk menguatkan semangat persatuan dan kebangsaan; (3) Penguatan nasionalisme lewat jalur pendidikan formal (sekolah maupun pesantren) merupakan salah satu langkah efektif menekan disintegrasi bangsa. Sumber utama penelitian adalah berbagai hasil penelitian dan dokumentasi tentang kajian keislaman dan ketradisional, dengan masyarakat majemuk menganut agama mayoritas Nasrani serta kekuatan gerakan Organisasi Papua Merdeka. Pengambilan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis

Abstract

This study refutes the opinion of Francis Fukuyama, in his book The End of History and the Last Man (2006) which states that nationalism is dead and does not need to be taught. Dewey (2010) which states that nationalism education for students forms the characteristics of a democratic life that cannot be separated from learning. This research shows that (1) the ideology of nationalism needs to be taught in formal education because it is considered dead; (2) Nationalism education is the basis for strengthening the spirit of unity and nationality; (3) Strengthening nationalism through formal education (schools and Islamic boarding schools) is one of the effective steps to suppress the disintegration of the nation. The main sources of research are various research results and documentation on Islamic and traditional studies, with a pluralistic society adhering to the Christian majority religion and the strength of the Free Papua Movement. Taking by means of observation, interviews and documentation analyzed through qualitative research with a phenomenological approach

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Dian Indriyani

STKIP Muhammadiyah Manokwari

Email : dindriyani413@gmail.com.

1. PENDAHULUAN

Francis Fukuyama, dalam bukunya *the end of history and the last man* yang menyatakan bahwa ideologi nasionalisme sudah mati dan tidak perlu diajarkan. Bagi Fukuyama manusia merupakan produk dari sejarahnya yang konkret dan lingkungan sosialnya, dan bukan dari sebuah koleksi atribusi yang natural (Adhyaksa Dault, 2015).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan teori Friedmann *the world is flat*, juga Geertz (Thomas L Friedman, 2016). Fenomena tersebut membuat dunia menuju ke arah yang lebih demokratis, di mana semakin banyak negara yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan, keterbukaan dan transparansi. Coulby dan Zambeta, 2015 juga sejalan dengan pernyataan tersebut. Dewey yang menyebutkan bahwa pendidikan nasionalisme bagi siswa membentuk karakteristik kehidupan yang demokratis dan tidak bisa dilepaskan dalam pembelajaran (John Dewey 2011). Sebagaimana pemahaman mereka, Maqsud berpendapat bahwa pendidikan nasionalisme

merupakan upaya membangkitkan kepribadian bangsa dan kebanggaan atas tanah air, karenanya penguatan atas nilai-nilai tersebut tidak bisa dinafikan lewat pengajaran di seluruh jenjang pendidikan.

Al-‘Ulaiyān, menyebutkan bahwa ide nasionalisme yang dikembangkan di Mesir melalui seluruh jenjang pendidikan mampu menguatkan ideologi kebersamaan berbagai suku menjadi sebuah negara besar dan diterapkan dalam berbagai nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Anderson melontarkan gagasan *imagined communities* dengan menggunakan pendekatan Durkheimian yang mengklaim bahwa nasionalisme berakar dari sistem budaya dalam suatu kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal satu sama lain (Benedict Anderson, 2011).

Suatu kesatuan media komunikasi, yakni bahasa menjadi factor kesamaan pengalaman bersama yang ditimbulkan oleh karya-karya sastra, menghasilkan suatu *imagined communities* yang didasari oleh perasaan senasib dan sepenanggungan.

Konstruksi nasionalisme semakin bertambah kuat terutama pasca berkembangnya konsep masyarakat madani yang dikaji dalam wacana-wacana akademik. Karakteristik masyarakat madani adalah *free public sphere* (ruang publik yang bebas) (Adam Ferguson, 2007). Karakteristik yang lain adalah demokratisasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial (*social justice*), partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab. Karakter lain yang tidak kalah pentingnya yaitu supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan.

Gerakan masyarakat madani yang membangun jiwa nasionalisme terbentur dengan berbagai persoalan yang mengarah pada riak-riak hingga aksi disintegrasi bangsa. Sebagai contoh aksi pengibaran bendera Papua Merdeka oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dinamika masyarakat madani dan aktifitas disintegrasi bangsa tidak bisa lepas dari dunia pendidikan sebagai jalur pembelajaran untuk menguatkan konstruksi nasionalisme (Andrew Ross, 2014). Berbagai pelajaran yang berhubungan dengan konsep nasionalisme seperti PPKN, PMP, hingga pendidikan kewargaan atau dikenal dengan *civic education*. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam asli Indonesia.

Pesantren Darussalam adalah pesantren yang berada dalam wilayah kota Manokwari Papua Barat yang didaulat dengan kota Injil. Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat mayoritas ras Melanesia yang mayoritas beragama Nasrani dengan proporsi 89.00 % beragama Nasrani; 3.00 % Hindu Budha; dan 8.00% beragama Islam.

Penting untuk dikaji karena di tengah ketidakpercayaan masyarakat konsep nasionalisme yang memunculkan gerakan disintegrasi dan anarkis sebagaimana sering dimunculkan oleh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pesantren Darussalam Manokwari mampu mempertahankan nilai-nilai (*values system*) yang diterapkan di pesantren itu sendiri, seperti (1) prinsip *tawasut* yang berarti tidak memihak atau moderasi; (2) *tawazun*, atau menjaga keseimbangan dan harmoni; (3) *tasamuh*, atau toleransi; (4) *‘adl* atau sikap adil; dan (5) *tasawur* atau prinsip musyawarah? Pentingnya studi ini untuk membuktikan melalui penguatan nasionalisme pesantren Darussalam Manokwari dapat membangun semangat kebersamaan, kebersatuan, dan meminimalisir upaya gerakan kemerdekaan Papua dengan tetap eksis memelihara tradisi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada Pondok Pesantren Darussalam yang berada di Jalan Gunung Semeru Jalur IV Kampung Aimasi, Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder serta data penunjang (Burhan Bungin, 2007). *Sumber data primer* merupakan hasil Observasi dan wawancara dengan dua komunitas. Komunitas Pesantren Darussalam yang terdiri dari pimpinan pondok pesantren, beberapa dewan guru PPKN. Sementara dari komunitas masyarakat adalah para tokoh adat, agamawan, institusi kementerian agama di wilayah kabupaten Manokwari.

Responden dari komunitas pesantren adalah: *Pertama*, Kyai H. Abdul Basyir. Ia adalah pimpinan pondok pesantren Darussalam sekaligus tokoh masyarakat muslim wilayah Manokwari. *Kedua*, Lusimin, Guru bidang studi PPKN, Eka Rahmawati, Guru bidang studi Sosiologi. *Ketiga*, Endang, Guru bidang studi Pendidikan Agama; *Keempat*, Agus Salim, bidang pramuka dan Paskibra; *Kelima*, Ridwan Januar bagian kurikulum; Eko Setiawan bagian kesiswaan. Responden dari komunitas masyarakat, yaitu: *Pertama*, Rumbekwuan. Ia adalah tokoh adat Papua dari suku Arfak. *Kedua*, Para agamawan seperti Pendeta Yakobus Mandacan, Pendeta Awom Abner, Kyai Syahrir Efendi, Kyai Bukhari keempat agamawan ini merupakan simbol dakwah yang membangun kebersamaan, dan penguat nilai-nilai nasionalisme. Responden lainnya adalah para santri dan santriwati Josefah, Fitria Aini, Elsa Adiguna, Aziz, dan perwakilan orang tua siswa Siti Juwariyah, Murwati, Tini.

Responden dari instansi daerah adalah, *Pertama*, Roni Kosepa, ia adalah Kepala (Kesbangpol) Manokwari; *Kedua*, Muthohir Syah ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) wilayah Manokwari. Selanjutnya *data sekunder* diambil dari berbagai dokumentasi yang berhubungan histiografi wilayah penelitian.

2.1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan materi nasionalisme dan implementasi serta tradisi di pondok pesantren Darussalam.
- b. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan utama studi ini
- c. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan nilai-nilai nasionalisme pada masyarakat Manokwari.

2.2. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis oleh Husserl. Pola analisis studi ini menggunakan kerangka berpikir induktif. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data wawancara untuk menjawab hasil studi, selanjutnya digunakan analisis komperatif, yaitu memperbandingkan antara pemikiran komunitas pesantren dengan komunitas masyarakat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori dalam studi ini adalah teori multikultural yang terkenal dengan konsep *melting pot society*, serta memaknai keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*) dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan (Benedict Anderson, 2011). Teori ini didasari gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*) (Carl J Richard, 2014).

Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Penguatan atas teori tersebut dikembangkan dari teori *cultural pluralism* oleh Berkson.

Ini juga sejalan dengan semangat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003. Salah satu diktum dari UUSPN Tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional meletakkan salah satu prinsipnya: “bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Teori ini sejalan dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam konteks pondok pesantren Darussalam Manokwari, santri dan siswa diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang suku, bahasa, dan budaya, adat istiadat, asal daerah (perkotaan atau pedesaan) yang dianut, dipahami semasa sebelum mondok di Pesantren. Lingkungan pondok memiliki berbagai adat istiadat, paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi

Dinamika kemajemukan tersebut memerlukan pertimbangan dalam membangun nilai-nilai nasionalisme lewat pendidikan pesantren, yaitu, meminimalisir *incompatibility* (ketidakmampuan hidup secara harmoni), *cultural pluralism* (keragaman kebudayaan), dan *development of positive self-image* (pengembangan citra diri yang positif). Hal tersebut diasumsikan sebagaimana dikembangkan dalam pendidikan multikultural bahwa *Pertama*, setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda, dan bahkan dapat saling memberikan kontribusi; *kedua*, keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak bagi semua warga Negara (Dennis Ross. 2014).

Tujuan pendidikan nasionalisme dapat terlihat dari sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Aspek sikap (*attitudinal goals*) dimana para santri dan siswa muncul kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Aspek pengetahuan (*cognitive goals*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya yang ada, menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Aspek pembelajaran (*instructional goals*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik.

Studi ini juga menggunakan Teori tentang Hubungan Masyarakat dari Ferdinand. Teori ini membantu memahami arti, makna dan konsepsi 'nasional', 'nasionalisme', 'rasa nasional' serta definisi nasionalisme karena semua ini lahir dari identifikasi diri seseorang terhadap kelompok yang ada (etnik, profesi, jenis kelamin, pengalaman dan sejarah penajajahan, dsb.).

3.1. Penerimaan Terhadap Aktivitas Masyarakat

Hasil wawancara dengan Abdul Basyir memperlihatkan bahwa secara normatif pesantren sangat apresiatif terhadap semua tradisi yang terjadi di lingkup masyarakat Manokwari. Ini ditegaskan olehnya dengan menguatkan konstruk latihan-latihan pidato santri yang diarahkan kepada nilai-nilai berbasis kawasan. Hasil wawancara dengan para responden santri memperkuat pernyataan Abdul Basyir sebagai pimpinan pondok. Menurut Intan mayasari, dewan guru menilai maksimal terhadap naskah pidato santri yang mengkaji materi yang berhubungan dengan tradisi masyarakat sekitar santri tinggal. Ia mencontohkan pidatonya yang mengangkat tema kebersamaan dalam rumah adat (*honai*) (Kal Muller, 2018.).

Rohaniawan dan intelektual Papua Neles Tebay, ia menyatakan terdapat nilai-nilai filosofis serta manfaat Honai diantaranya: sebagai tempat belajar mengenai kehidupan, bermusyawarah untuk kepentingan dalam mengadakan pesta adat, termasuk untuk mengatur strategi perang melawan musuh

Geertz berpendapat bahwa masalah etnic secara psikologis menjadi sangat kuat mempengaruhi seseorang karena munculnya kesadaran akan persamaan asal-usul, tempat kelahiran, bahasa dan pandangan hidup. Glazer dan Moynihan bahwa keunggulan suatu etnik hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap Negara, bukan sebaliknya justru menimbulkan sikap primordial yang berlebihan.

Sikap primordial yang berlebihan menimbulkan anggapan bahwa primordialisme dalam perkembangannya tidak hanya menyangkut orang tertentu, tetapi menyangkut identitas suatu masyarakat yang sangat cepat terbentuk melalui persahabatan.

Adanya pengaktualisasian budaya terhadap nilai-nilai kehidupan, hendaknya dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi dan menghindari terjadi konflik. Roni Kosepa sebagai Kepala Bidang Pengembangan Nilai Kebangsaan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Manokwari mengatakan bahwa terlepas dari banyaknya hal-hal yang dapat memecah belahkan warga Papua, namun dengan adanya beberapa budaya yang didasarkan kepada Nasionalisme dapat dijadikan landasan dasar sebagai salah satu pemersatu warga Papua dengan nilai-nilai kebersamaan yang terjalin, dengan demikian maka akan semakin menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme di tanah Papua.

Lusimin ketika menjelaskan pada mata pelajaran PPKN, mengarahkan kepada para Siswa /santri agar selalu mempertahankan rasa kebersatuan, ini juga yang menjadi salah satu tema pidato sebagai wujud ekspresi terhadap kecintaan terhadap lingkungan sekitar.

Langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya ialah menetapkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua pada tanggal 23 Desember 2004. Keputusan Konstitusi mengenai untuk tetap memberlakukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No. 45 tahun 1999 merupakan langkah politik yang dapat membantu menyelesaikan persoalan di Papua. Hal lain juga dilakukan dengan *Multi-track Diplomacy* untuk memperoleh dukungan internasional terhadap integritas Papua dalam wilayah NKRI.

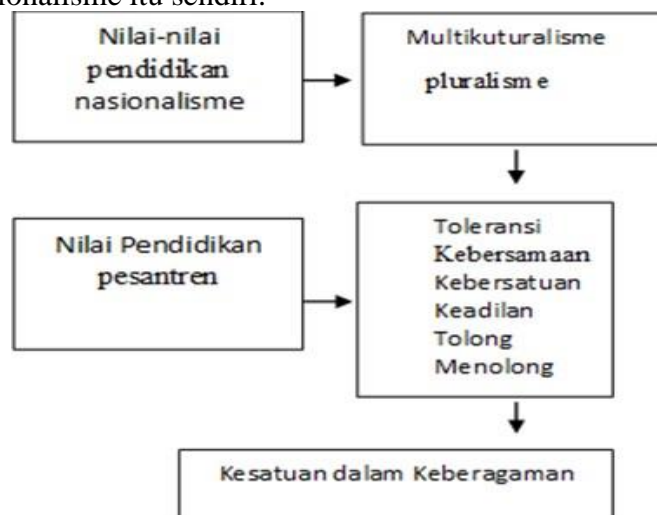
Rumbekwan sebagai tokoh masyarakat dan tetua adat di wilayah Manokwari juga menjelaskan sejarah Papua Barat hingga perkembangannya sekarang baik dari faktor politik, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keragaman budaya serta agama.

Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam pada setiap pidatonya yang bertemakan kebersatuan dalam keberagaman di wilayah minoritas Papua Barat. Ia juga menambahkan bahwa pesantren hendaknya menunjukkan sikap akomodatif dalam setiap perubahan zaman sehingga memunculkan karakter yang toleran dan damai serta bisa mengimbangi besarnya arus teknologi yang berkembang sekarang ini.

Nilai-nilai yang dipertahankan pada pesantren seperti (1) prinsip *tawasut* yang berarti tidak memihak atau moderasi; (2) *tawazun*, atau menjaga keseimbangan dan harmoni; (3), *tas}a>mu{*, atau toleransi; (4) *adl* atau sikap adil; dan (5) *tas}awur* atau prinsip musyawarah. Oleh karenanya, Abdul Basyir menegaskan bahwa keberadaan pesantren ini hendaknya menjadi perekat masyarakat dalam wilayah budaya, etnis, dan agama dengan berusaha menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dengan diharapkan nantinya para siswa/santri dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Faktanya siswa/santri bersama-sama membantu santri lainnya apabila sebagian mereka kurang mampu baik dalam memahami pelajaran, maupun dalam hal ekonomi. Dengan cara saling menyisihkan sebagian uang jajan mereka, untuk membantu siswa/santri tersebut. Kegiatan ini dapat menyentuh serta menumbuhkan jiwa kesetiakawanan siswa/santri, karena mereka merasa senasib dan sepejuangan dalam kehidupan pesantren. \

Pondok pesantren pada dasarnya merupakan wadah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Dan dapat mengarahkan siswa dan santrinya agar kelak dapat hidup secara damai dan diterima di masyarakat sebagaimana yang terdapat pada nilai-nilai filosofis nasionalisme itu sendiri.



Gambar 1 Nilai-nilai pendidikan Nasionalisme di pondok pesantren Darussalam

4. KESIMPULAN

Nasionalisme merupakan sikap loyalitas untuk membangun kemandirian bangsa berlandaskan kesetiakawanan, kebersatuan dan kebersamaan. Penelitian ini membuktikan bantahan terhadap Francis Fukuyama yang menyatakan bahwa nasionalisme sudah mati dan tidak perlu diajarkan. Pondok Pesantren Darussalam merupakan wadah untuk mengimplementasikan nilai-nilai Nasionalisme di Manokwari yang terkenal dengan kota Injil. Pendidikan nasionalisme bagi siswa membentuk karakteristik kehidupan demokratis yang tidak bisa dilepaskan dalam pembelajaran. Penguatan nasionalisme ini dilakukan lewat jalur pendidikan formal (sekolah maupun pesantren) seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darussalam yang dipimpin oleh KH. Abdul Basyir. DZ sebagai kontrol sosial yang berperan aktif dalam membina kerukunan dengan tidak ikut jika terjadi riak-riak konflik yang muncul dalam lingkungan masyarakat Papua.

Diantaranya ialah mengajarkan nilai-nilai nasionalisme, melalui nilai-nilai dari; (1) kesederhanaan baik dalam pola pikir, tingkah laku; (2) Serta keikhlasan yang tulus dalam melakukan berbagai macam kegiatan sosial yang telah menjadi bagian dari aktifitas yang dapat ditunjukkan oleh pesantren dalam memaknai nasionalisme; (3) Kebebasan dalam memilih pekerjaan dengan melakukan kemandirian siswa/santinya baik dari segi keilmuan, maupun dalam berwirausaha seperti bercocok tanam dalam bidang pertanian dan perkebunan, dan menyediakan beberapa keterampilan seperti menyablon, membuat janur, dan menjahit; (4) Adapun dalam menyelesaikan berbagai kasus yang berkenaan dengan keagamaan, dilakukan dengan cara musyawarah.

Penguatan lain dilakukan melalui langkah-langkah: *Pertama*, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dengan memahami konsep dasar dan awal mula berkembangnya nilai kebangsaan dalam ranah akademik; *Kedua*, menciptakan gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai multikulturalisme; *Ketiga*, Memahami konsep Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita dengan menghargai keberagaman, sesuai dengan nilai-nilai toleransi dan pluralisme; *Keempat*, Menumbuhkan nilai-nilai dasar dalam Pancasila sesuai dengan nilai-nilai patriotisme dengan menjadikan warga negara aktif dalam membangun bangsa dan negara melalui pendidikan yang dapat menjunjung martabat dan hak asasi manusia.

Dengan memprioritaskan pembelajaran pendidikan nasionalisme melalui materi PPKn, Pendidikan Kewarganegaraan, dan *Civic Education* pada semua jenjang pendidikan. Indikator diatas menjadikan Pondok Pesantren Darussalam dalam proses pembelajarannya melaksanakan 100% kurikulum umum dan 100% kurikulum ditambah lagi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti Kepramukaan, Paskibra, PMR, Pecinta Alam dan kegiatan kemasyarakatan berupa silaturahmi (anjangsana), bakti sosial, kerja bakti yang rutin dilakukan setiap minggunya.

Dengan Model pembelajaran humanisme, dan pluralisme yang diterapkan sebagai pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial- seperti pendidikan agama Islam. Sikap kesabaran, welas asih dan toleransi, menjunjung kearifan budaya yang ditunjukkan masyarakat pesantren Darussalam terutama ketika menghadapi celaan dan cemoohan terhadap kegiatan pesantren di lingkungan komunitas mayoritas kristen. Pendidikan Nasionalisme yang diajarkan pesantren Darussalam Manokwari diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan, kebersatuan, dan meminimalisir upaya gerakan kemerdekaan Papua dengan tetap eksis memelihara tradisi Islam.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena dukungan dari Lembaga; 1) STKIP Muhammadiyah Manokwari, 2) Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, dan Universitas Muhammadiyah Semarang

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ferguson. 2007. *an Essay on The History of Civil Society*. Teddington: Echo Library.
- Adhyaksa Dault. 2015. *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Adi Suryadi Culla. 2009. *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amitai Etzioni. 1996. *The New Golden Rule*. New York: Basic Book.
- Andrew Ross. 2014. *No-Collar: The Humane Workplace and Its Hidden Costs*. Philadelphia, Pa.: Temple Univ. Press
- Antonio T De Nicolás. 2001. *Habits of Mind : An Introduction to The Philosophy of Education* . New York: Authors Choice Press.
- Arief Budiman; Luthfi Assyaukanie; Stanley. 2016. *Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan, 1965-2005*. Jakarta: Kerja sama Freedom Institute dan Pustaka Alvabet.
- Asrori S Karni. 2009. *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Benedict Anderson. 2011. *Imagined Communities. Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press.
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Carl J Richard. 2014. *The Battle for The American Mind : A Brief History of A Nation's Thought*. Lanham, MD : Rowman and Littlefield.
- Chris Heaton, Ernest Renan. *Tt. 20th Century Thinker on Nationalism and 19th Century Orientalist*, Departement of Theoretical and Applied Linguistic. University of Edinburgh: United Kingddom.
- David Coulby and Evie Zambeta. 2015. *Globalization and Nationalism in Education*. New York: Routledge.
- David Herbert. 2013. *Religion and Civil Society: Rethinking Public Religion In The Contemporary World*. Aldershot: Ashgate.
- David T Hansen. 2015. *John Dewey and Our Educational Prospect: A Critical Engagement with Dewey's Democracy and Education*. Albany: State University of New York Press.
- Dennis Ross. 2014. *The Missing Peace: The Inside Story of The Fight for Middle East Peace* New York, N.Y.: Farrar, Straus and Giroux.
- Esther Heidbüchel. 2007. *The West Papua Conflict in Indonesia : Actors, Issues and Approaches*. Wettenberg J & J Verlag.
- James A. Bank, (ed.). 1989. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- John Dewey. 2011. *Democracy And Education: an Introduction to The Philosophy of Education* . New York: Nabu Press.
- Kal Muller. 2018. *Introducing Papua*. T.tp: Daisy World Books.
- M. Amin Haedari, Abdullah Hanif. 2016. *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta: IRD Press, 2006.
- Naja>d al-Bar'i<. 2016. *S}una>'u al-Mustaq}bal: Barna>mij Tadri>b al-Mas}a>rifi< al-Ans}it}ati al-s}aqa>fiy*. T.tp: Kotobarabia.
- Ricardo L. 1999. Garcia *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher.
- Thomas L Friedman. 2016. *The World is Flat: The Globalized World In The Twenty-First Century*. London: Penguin Books.
- W. D. Ross; Philip Stratton-Lake. 2012. *The Right and The Good*. Oxford: Clarendon Press
- Yakobus D. Dumupa. 2016. *Berburu Keadilan di Papua, Mengungkap Dosa-Dosa Politik Indonesia di Papua Barat*. Jakarta: Aliansi Mahasiswa Papua dan PHB.